

Kebijakan Pendidikan: Perencanaan Pembelajaran Guna Menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO)

Khalimatus Sa'diyah* dan Rahma Puspita Ningrum

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

*Penulis Koresponden: khalimatussadiyah808@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan bagaimana perencanaan pembelajaran anti Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang diterapkan kepada siswa mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kasus Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang terus meningkat menunjukkan bahwa diperlukan solusi dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan melibatkan beberapa pihak mulai dari guru, Dinas Pendidikan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), murid serta para orang tua peserta didik maka bisa menghasilkan kolaborasi yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang diusulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder (library research) baik dari media, jurnal, berita atau buku yang relevan dan mampu menjawab rumusan masalah. Berdasarkan jenis penelitian kualitatif maka ada empat tahapan dalam menganalisis data mulai dari proses pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Melalui tahap-tahap tersebut maka akan menghasilkan kajian faktual dan temuan dari tema yang diangkat. Kebijakan yang diusulkan bahwa pembelajaran Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang diajarkan tidak hanya melalui materi saja namun juga memberikan kesempatan langsung kepada murid untuk berkampanye sosial dan belajar kepada Dinas Pendidikan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) nantinya diharapkan bisa menjadi sebuah usulan yang mampu mengurangi permasalahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang ada.

Kata kunci : Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO), kebijakan pendidikan, permasalahan.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to explain how anti- Online Based-Gender Violence (KGBO) learning planning is applied to students starting from the junior high school level. The Online Based-Gender Violence (KGBO) case that continuous to increase shows that a solution is needed in dealing with these problems. By involving several parties ranging from teachers, the Education Office and the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A), students and parent of students, it can produce good collaboration to implement the proposed education policy. The research method used is descriptive qualitative by using secondary data (library research) from the media, journals, news or books that are relevant and able to answer the problem formulation. Based on the type of qualitative research, there are four stages in analyzing data starting from the process of collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. Through these stages it will produce a factual study and findings of the theme raised. The proposed policy that Online Based-Gender Violence (KGBO) learning is taught not only through material but also provides direct opportunities for student to campaign socially and learn to the Education Office and the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) which is expected to become a suggestion that can reduce existing Online Based-Gender Violence (KGBO) problems.

Keywords: Online Based-Gender Violence (KGBO), the policy of education, the problem

PENDAHULUAN

Era digital dan teknologi yang semakin berkembang pesat mendorong semua manusia untuk bisa menggunakan teknologi guna mempercepat mobilisasi dan komunikasi. Utamanya pada era pandemi seperti saat ini manusia lebih disarankan menggunakan media untuk berkomunikasi dibandingkan dengan bertemu secara langsung. Namun penggunaan teknologi dan informasi di

era digital ini dapat juga menimbulkan efek negatif. Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) merupakan salah satu efek negatif dari perkembangan teknologi.

Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) merupakan kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan internet, yang salah satunya adalah kekerasan berbasis gender yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan dimana biasanya mayoritas yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat dari adanya distribusi kuasa yang timpang antara pria dan wanita atau biasa juga dikenal dengan sebutan Kekerasan Berbasis Gender (KGB) yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah *online*¹. Perempuan merupakan korban yang paling rentan dan memiliki resiko yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan berbasis gender *online*. Kekerasan ini merupakan kekerasan verbal yang dilakukan seseorang yang mayoritasnya pria kepada wanita melalui media sosial. Kekerasan ini biasa dilakukan kepada wanita karena karena lemahnya peran wanita khususnya di bidang sosial kultural dibanding dengan peran pria.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KGBO) seperti tulisan Tiara Aulia mengenai Fenomena Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Kalangan Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dimana penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kekerasan berbasis gender *online* yang terjadi khususnya di kalangan mahasiswi². Kekurangan dalam penelitian ini hanya membahas kekerasan gender berbasis *online* yang terjadi pada mahasiswi saja. Sedangkan penelitian ini nantinya akan membahas bagaimana penanganan KGBO diranah pendidikan mulai dari siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Andriyani dkk mengenai Perancangan yang dilakukan untuk membuat strategi meningkatkan *awareness* terhadap kasus Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO). Kampanye ini dilakukan untuk merancang strategi kampanye sosial untuk meningkatkan *awareness* agar target audiens lebih mawas diri dan dapat megantisipasi terjadinya Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KBGO) dengan menggunakan media Instagram³. Kekurangan penelitian ini hanya sebatas perancangan kampanye yang dikerjakan oleh penulis melalui akun instagram sehingga jangkauanya sangat sempit dan pihak-pihak yang terlibat tidak banyak. Perancangan ini juga membutuhkan waktu dan pengerjaan yang fokus dan pengerjaan yang rutin agar kampanye dapat lebih mendalam dan lebih mengena pada target.

Data terakhir menunjukkan kekerasan gender berbasis *online* diestimasi akan meningkat lebih dari 40% tahun ini. Ada 281 kasus tercatat sepanjang 2019 sementara sudah ada 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan terakhir saja. Penelitian terakhir juga menyebutkan bahwa sebagian besar korban berasal dari generasi muda. Hal tersebut bisa terjadi karena sebagian besar yang menggunakan internet adalah anak muda baik untuk bekerja maupun belajar. Dari aspek gender,

¹ SAFEnet. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. 2, 20.2020 <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

² Tiara Aulia Putri, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Di Kalangan Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia", (Skripsi., Universitas Pendidikan Indonesia, 2020)

³ Andriyani Illene et al., "Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online." Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra

mereka yang rentan menjadi korban adalah wanita, yaitu 71%. Sayangnya hingga detik ini Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas tentang kekerasan berbasis gender *online*. Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan yang dibuat sebagai salah satu bentuk upaya penanganan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender *online* dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan terhadap pelaku⁴.

Sepanjang 2017, setidaknya ada 8 bentuk Kekerasan Gender Berbasis *Online* yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegalcontent*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*). Sementara itu, dalam Internet Governance Forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender *online* mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KBGO) juga dapat masuk ke dunia *offline*, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara *online* maupun langsung di dunia nyata saat *offline*⁵.

Korban atau penyintas Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KBGO) mengalami dampak yang berbeda-beda. Berikut ini hal-hal yang mungkin dialami para korban dan penyintas Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KBGO) antara lain: 1) kerugian psikologis dimana korban atau penyintas mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan, 2) keterasingan sosial para korban atau penyintas menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dari lingkungan keluarga dan teman-teman, 3) kerugian ekonomi, para korban atau penyintas menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan, 4) mobilitas terbatas, para korban atau penyintas kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang *online* dan/atau *offline*, 5) sensor diri, dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital. Di samping itu menghapus diri dari internet memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional⁶.

Perlu adanya langkah khusus untuk menyikapi Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KBGO) ini utamanya pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mencegah dan menyikapi Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KBGO). Dalam rangka mengimplementasikan peranan tersebut penting kiranya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan dalam bidang pendidikan yang secara langsung dapat diterapkan terutama pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang secara khusus untuk mencegah dan menyikapi adanya Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KBGO) terutama pada kaum wanita. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam berbentuk Peraturan Menteri serta turunan lainnya, untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran guna mencegah dan menyikapi KBGO terutama melalui lingkungan pendidikan.

⁴ “Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya dan Apa yang Bisa Dilakukan”, diakses 31 Maret, 2021, <https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230>

⁵ SAFEnet. “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan.” 2, 20. 2020 <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

⁶ SAFEnet. “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan.” 2, 20. 2020 <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

Teknis dalam perencanaan pembelajaran mengenai Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah misalnya melalui program kegiatan pembelajaran, program ekstrakurikuler, dan pembentukan konselor sebaya di sekolah yang bisa membantu dalam penanggulangan dan penanganan Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO).

Adanya usulan mengenai perancangan pendidikan di tingkat sekolah karena melalui pendidikan agar mereka mempunyai bekal yang kuat saat masih di bangku sekolah terutama agar terhindar dari Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO). Nantinya usulan ini akan melibatkan Dinas Pendidikan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, guru bimbingan konseling, siswa dan orang tua. Perlu adanya rancangan khusus terutama oleh bimbingan konselor yang ada di setiap sekolah untuk dapat menyampaikan pembelajaran mengenai Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) ini dan lebih menekankan pada paradigma kesetaraan gender, di samping seorang konselor harus menampilkan diri sebagai figur yang sensitif gender. Strategi yang tidak kalah pentingnya adalah mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kurikulum sehingga memerlukan dukungan sistemik untuk merumuskan proses pembelajaran yang sensitif gender⁷.

Berdasarkan latar belakang di atas maka bisa ditemukan sebuah permasalahan terkait dengan Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) yang terus meningkat di Indonesia. Permasalahan tersebut adalah bagaimana perencanaan pembelajaran guna menyikapi Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO)? Sedangkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu menjelaskan bagaimana perencanaan pembelajaran guna menyikapi Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO).

STUDI PUSTAKA

Kebijakan Pendidikan

Makna kebijakan pendidikan adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh lembaga berwenang dalam hal ini pemerintah di bidang pendidikan sebagai bentuk reaksi yang muncul dari beragam permasalahan di bidang tersebut sehingga dibutuhkan suatu rancangan regulasi yang berguna dalam mencapai visi dan misi pendidikan⁸. Kebijakan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan nasional. Arti pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi dalam mengembangkan *skill* serta membentuk karakter generasi penerus bangsa agar menjadi negara yang bermartabat.

Kebijakan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas diarahkan dalam mencapai beberapa tujuan di antaranya adalah melakukan pembaharuan sistem salah satunya pembaharuan kurikulum yang berlaku di tingkat nasional maupun lokal. Pembaharuan sistem ini bertujuan agar bisa memberikan

⁷ “Memahami dan Mengatasi Kekerasan Gender di Sekolah dari Perspektif Bimbingan dan Konseling”, diakses pada 31 Maret, 2021, <http://bk.fip.uny.ac.id/berita/memahami-dan-mengatasi-kekerasan-gender-di-sekolah-dari-perspektif-bimbingan-dan-konseling>

⁸ Yanti, S, “Analisis Kebijakan Pendidikan,” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26, <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>

pelayanan atas keberagaman peserta didik. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah peningkatan kemampuan akademik, professional serta jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu bekerja secara optimal khususnya dalam pembentukan pendidikan budi pekerti dan watak generasi penerus. Di samping itu, sebagai upaya perluasan dan pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkualitas tinggi. Tujuan terakhir adalah pemberdayaan lembaga pendidikan formal maupun non formal sebagai pusat pembelajaran nilai, kemampuan serta sikap.

Melalui perencanaan kebijakan pendidikan, perencanaan pembelajaran disusun guna menangani permasalahan Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) yang semakin meningkat. Kebijakan pendidikan dianggap penting sebagai langkah awal dalam memasukkan pembelajaran tentang Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) dan penggunaan digital teknologi dengan baik kepada para peserta didik.

Perencanaan Pembelajaran

Pengertian perencanaan adalah sebuah upaya yang dimulai dengan penetapan target yang akan dicapai sehingga persiapan cara untuk mencapainya benar-benar dipertimbangkan⁹. Sedangkan pembelajaran memiliki makna suatu proses interaksi yang melibatkan beberapa aktor mulai dari peserta didik, pendidik dan sumber belajar yang terjadi di dalam lingkungan belajar. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi yang interaktif dan edukatif guna mencapai tujuan. Prosesnya dimulai dari perancangan, pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Proses yang sistematis ini terjadi melalui beberapa tahapan. Pertama, melibatkan proses mental dari peserta didik secara maksimal. Kedua, dibangunnya suasana dialogis dan suasana tanya jawab yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan agar bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kedua tahapan ini secara tidak langsung bisa membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan secara masif¹⁰.

Berdasarkan kedua pengertian di atas maka konsep perencanaan dan pembelajaran dapat disimpulkan menjadi proses penentuan keputusan secara rasional terkait tujuan tertentu dengan memanfaatkan potensi serta sumber belajar yang telah ada. Saat tujuan yang ditetapkan jelas, strategi belajar yang digunakan oleh pendidik cocok maka kemungkinan proses perencanaan pembelajaran akan mudah dilakukan. Antara pendidik dan peserta didik terhubung satu sama lain. Peranan pendidik bisa dibidang cukup penting. Pendidik tidak hanya dijadikan sebagai sumber belajar tapi dia juga merepresentasikan sebagai seorang yang ahli dalam menata sumber-sumber belajar lain kemudian mengintegrasikannya ke dalam tampilan dirinya.

Karakteristik Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang dipersiapkan dengan matang, tidak hanya sekedar menentukan metode biasa, akan tetapi memilih yang paling baik agar perubahan yang pada diri peserta didik baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun tingkah laku. Perencanaan pembelajaran ini memiliki beberapa karakteristik¹¹, di antaranya adalah disusun guna

⁹ Nasution, W. N, "Perencanaan Pembelajaran: Pengertian, Tujuan dan Prosedur," (Ittihad: 2017), 185–195.

¹⁰ Hanafy M. S, ." Konsep Belajar Dan Pembelajaran," *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 17(1), 66–79, <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n1a5>

¹¹ Nasution, W. N, "Perencanaan Pembelajaran: Pengertian, Tujuan dan Prosedur," (Ittihad: 2017), 185–195.

mengubah perilaku siswa agar sesuai dengan tujuan. Direncanakannya Tujuan dibuat tentu agar bisa dicapai, hal ini berlaku juga dalam perencanaan pembelajaran. Fokus dalam pelaksanaannya agar berhasil adalah mengubah siswa yang sebelumnya tidak memahami menjadi paham materi. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Ketika perencanaan disusun tentu sudah dengan pertimbangan berbagai aspek yang bisa berpengaruh pada hasil. Sumber daya yang ada menjadi pendukung agar keberhasilan proses pembelajaran bisa tercapai. Di samping itu, harus berisi rangkaian kegiatan. Beberapa kegiatan telah disiapkan dalam proses perencanaan pembelajaran. Rangkaian kegiatan ini akan dipersatukan dengan sumber daya yang tersedia yaitu pendidik serta media pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Prinsip Perencanaan Pembelajaran

Terdapat beberapa prinsip yang harus disesuaikan saat perencanaan pembelajaran itu dibuat. Prinsip perencanaan pembelajaran berkaitan erat dengan karakteristik perencanaan pembelajaran. Kedua konsep tersebut harus berjalan beriringan agar bisa mencapai tujuan yang disusun¹². Prinsip yang pertama adalah, prinsip perbedaan individu. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap individu memiliki sifat dan ciri yang berbeda. Pendidik harus mampu memahami keberagaman tersebut dalam menyiapkan dan menyajikan pembelajaran di kelas. Keadaan ini membuat guru harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi perbedaan-perbedaan apa saja yang melekat dalam diri peserta didik. Kedua, prinsip perkembangan, pada dasarnya peserta didik yang sedang belajar berada dalam fase perkembangan yang terus akan berjalan. Kemampuan berkembang tiap peserta didik berbeda, ada yang cepat berkembang namun ada pula yang cenderung lambat. Tugas pendidik tentu mampu memahami kondisi tersebut. Apabila ada peserta didik yang belum mampu menunjukkan kemajuannya, maka tugas pendidik membantu peserta didik itu agar bisa mengejar ketertinggalannya.

Ketiga, prinsip motivasi yaitu penggerak seseorang dalam melakukan sesuatu. Motivasi memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya motivasi, peserta didik akan malas mengikuti pembelajaran di kelas. Kondisi itulah yang mengharuskan seorang pendidik kreatif dalam membangkitkan motivasi para siswanya, misalnya saja menggunakan metode dan media belajar yang berbeda, memilih bahan ajar yang sesuai dengan minat siswa. Terakhir, prinsip minat dan kebutuhan anak. Karakter peserta didik yang memiliki minat dan kebutuhan berbeda membuat pendidik menyiapkan penyampaian pelajaran yang bervariasi. Diperhatikannya minat dan kebutuhan ini akan menyebabkan perhatian dalam diri peserta didik muncul sehingga mereka akan cenderung untuk mendengarkan pembelajaran yang berlangsung.

Kekerasan Gender Berbasis Online

Pengertian Kekerasan Gender Berbasis *Online* atau KGBO adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan pada gender melalui kecanggihan produk teknologi misalnya melalui media sosial¹³. Hampir sama dengan kekerasan pada umumnya Kekerasan Gender Berbasis *Online* ini bertujuan untuk melecehkan korban. Bentuk kekerasan gender berbasis *online* ada 8 di antaranya pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*),

¹² Ananda, R. "Perencanaan Pembelajaran," (2019).

¹³ SAFEnet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. 2, 20. 2020 , <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto atau video probadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*) dan rekrutmen *online* (*recruitment online*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Association for Progressive Communications* (APC) ada tiga tipe orang yang paling beresiko mengalami Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO)¹⁴. Pertama, seseorang yang terlibat dalam hubungan intim, hal yang bisa dilanggar berupa keintiman dan kepercayaan. Melalui penggunaan produk teknologi maka pelaku membuat konten yang tujuannya untuk dieksploitasi kepada publik. Kedua, kalangan profesional yang terlibat dalam ranah publik misalnya jurnalis, aktivis, peneliti, aktor, penulis dan lain-lain. Pelaku biasanya memanfaatkan kebebasan berekspresi baik secara personal maupun politis dalam melakukan kekerasan gender berbasis *online* kepada korban. Bentuk kekerasan *online* yang manyasar kalangan ini adalah pelecehan secara verbal, pembungkaman, dan ancaman. Tipe terakhir adalah korban penyerangan fisik, di mana pelaku cenderung menjadikan fisik korban sebagai target kekerasan. Hal ini dilakukan pelaku dengan cara merekam fisik korban.

Dampak Kekerasan Gender Berbasis *Online*

Tindakan kekerasan gender berbasis *online* adalah permasalahan serius yang harus dicari solusinya mengingat dampak yang dialami korban cukup beragam. Masing-masing korban bisa mengalami dampak yang berbeda satu sama lain. Beberapa dampak tersebut pertama dilihat dari sisi psikologis. Secara tidak langsung para korban Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) akan mengalami ketakutan, depresi dan cemas yang berlebihan. Bahkan, apabila korban yang memiliki kesehatan mental yang kurang baik maka korban terkadang memiliki pikiran untuk melakukan bunuh diri. Hal ini menandakan bahwa kekerasan gender berbasis gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap korban. Dampak kedua adalah korban merasakan Keterasingan diri. Orang yang menjadi korban kekerasan gender berbasis *online* akan membuat dirinya kehilangan rasa percaya diri khususnya dalam menggunakan teknologi digital. Mereka akan cenderung menonaktifkan akun sosial media yang dimiliki.

Kondisi akan membuat mereka menjauh dari dunia maya, akibatnya akses informasi, komunikasi sosial dan layanan tidak didapatkan oleh korban itu sendiri. Di samping itu, korban juga mengalami keterasingan sosial. Seseorang yang telah mengalami kekerasan gender berbasis *online* maka dia akan berusaha menarik diri dari kehidupan publik mengingat kekerasan gender berbasis *online* tentu mudah diketahui oleh banyak orang termasuk keluarga dan teman-teman. Pelaku dengan mudahnya menyebarkan foto ataupun video tanpa persetujuan korban di internet. Akibatnya korban akan merasa malu sehingga dia cenderung tertutup dengan masyarakat.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik identik dengan aturan-aturan yang mengatur sektor layanan umum bagi masyarakat. Orientasi yang dibuat dalam pengaturan kebijakan publik adalah pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat¹⁵. Pelaksanaan dari kebijakan publik dapat dipahamai

¹⁴ SAFEnet, . *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. 2, 20.2020, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

¹⁵ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12, <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

sebagai penerapan yang bermuara pada aksi, aktifitas, tindakan serta mekanisme yang dibingkai dalam sebuah sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan tidak sebatas pada pertanggung jawaban lembaga administratif saja tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, kekuatan politik dari pihak lain serta keadaan sosial dan ekonomi. Proses pembuatan kebijakan publik meliputi beberapa tahapan mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi regulasi yang telah dibuat.

Tahapan pertama adalah *agenda setting*, di mana ada tiga proses yang dilakukan di dalamnya. Proses tersebut dimulai dari membangun persepsi para *stakeholders* bahwa fenomena yang ada dianggap masalah sehingga butuh sebuah kebijakan guna mengatur permasalahan yang ada. Kemudian, para *stakeholders* membuat batasan masalah. Terakhir, mobilisasi dukungan atas masalah yang dibahas agar masuk dalam agenda pemerintah. Mobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok yang ada di masyarakat, mengangkat masalah di media massa, mencari dukungan melalui kekuatan politik yang dimiliki para pihak dan lain sebagainya.

Pada tahap *policy formulation*, kegiatan analisis kebijakan dilakukan agar mendapatkan informasi yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dikembangkan alternatif-alternatif kebijakan yang masih relevan. Memasuki tahapan *decision making*, maka *stakeholders* akan mengambil keputusan mengenai hasil akhir rancangan kebijakan yang dianggap paling efisien dan efektif. Kebijakan yang dipilih akan disahkan agar memiliki kekuatan hukum. Tahap keempat adalah *policy implementation*, di mana dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan diperlukan agar regulasi yang dibuat terlaksana dengan baik¹⁶. Agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik maka sering kali digunakan mekanisme insentif serta sanksi, sehingga masyarakat mematuhi regulasi yang dibuat. Saat implementasi kebijakan, maka bisa diketahui kinerja serta dampak apa saja yang dihasilkan. Adanya kinerja dan dampak tersebut berguna dalam tahapan evaluasi, agar kebijakan yang dibuat di masa mendatang lebih baik dan membawa dampak positif yang lebih banyak.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rasionalitas pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan sebuah fenomena sosial bisa dijelaskan dengan detail dan mendalam melalui pendekatan ini. Selain itu, penulis juga mampu mengumpulkan data lebih kompleks. Data yang kompleks akan menghasilkan hasil yang spesifik. Metode yang dipilih adalah deskriptif, dengan tujuan agar penulis bisa menggambarkan secara sistematis terkait fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Penelitian ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Hal ini berpengaruh pada hasil akhir yang disajikan serta memiliki nilai kebaruan tersendiri yang membedakan dengan penelitian sebelumnya¹⁷.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, sehingga untuk mendapatkan data yang relevan maka peneliti menggunakan jurnal, buku, artikel ilmiah atau referensi lainnya. Tujuan penggunaan metode studi pustaka dalam proses pengumpulan data dikarenakan sumber-sumber referensi memiliki sifat yang tidak terbatas pada ruang atau waktu. Hal tersebut

¹⁶ Handoyo, "Kebijakan Publik" *Kebijakan Publik Deliberatif*, (2012)

¹⁷ Rahmat, "Ragam Penelitian Kualitatif," *Equilibrium*, vol 5 No 9, <https://doi.org/10.31227/osf.io/jaxbf>

memudahkan peneliti mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di masa lampau. Berdasarkan pendekatan kualitatif, ada empat tahapan proses penelitian yaitu pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan¹⁸. Tahap pertama, penulis mencari data dari beberapa sumber baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Selanjutnya, penulis memilih dan memilah data dalam kategori yang relevan dengan tema yang ditulis. Kemudian dilanjutkan dengan proses menyajikan data sampai menghasilkan kesimpulan. Tahapan terakhir, penulis melakukan penarikan kesimpulan¹⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang terus meningkat tidak bisa dianggap remeh. Di samping itu tidak bisa mengandalkan satu pihak saja untuk menangani permasalahan yang telah ada sebelumnya. Dibutuhkan kerja sama beberapa pihak agar kasus ini bisa berkurang. Perencanaan pembelajaran anti Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang diusulkan ini melibatkan melibatkan guru, siswa, Dinas Pendidikan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta orang tua. Masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda namun terhubung satu sama lain. Kebijakan ini berfokus pada ranah pendidikan karena melalui pendidikanlah maka generasi penerus memiliki bekal yang cukup serta diharapkan tidak melakukan kekerasan gender berbasis online kepada orang lain.

Peran Dinas Pendidikan Dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

Pelaksanaan kebijakan perancangan pembelajaran dalam bidang pendidikan khususnya guna menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) tidak terlepas dari peran penting Dinas Pendidikan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) selaku pemangku tugas untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban kekerasan. Korban kekerasan pun tidak hanya perempuan, namun juga anak-anak. Adanya peran penting P2TP2A yang berkaitan dengan perempuan dan anak maka penting adanya kolaborasi untuk mencegah dan menyikapi adanya Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) terutama pada era pandemi ini.

Perlu adanya koordinasi Dinas Pendidikan terutama dalam pembuatan materi untuk kegiatan pembelajaran, pelaksanaan program-program kerja seperti kegiatan sosialisasi untuk mencegah dan menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) terutama pada perempuan khususnya anak-anak, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dinas Pendidikan sangat berperan dalam mencegah kekerasan melalui kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, atau dapat dimasukkan ke dalam muatan lokal di sekolah sebagai prioritas utama. Pentingnya memasukkan pembelajaran mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) ke dalam kurikulum sehingga nantinya akan memberikan bekal kepada siswa agar terhindar dari Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dan dapat menyikapi jika mengalami tindak Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).

Peran Guru Bimbingan Konseling

Tidak bisa dipungkiri bahwa peran guru Bimbingan Konseling di sekolah cukup penting. Perannya berkaitan langsung dengan pengembangan diri pada peserta didik sesuai dengan potensi,

¹⁸ Dull, E., & Reinhardt, S. P. "An analytic approach for discovery," *SAGE Publication* (Second Edition, Vol. 1304, 2014), SAGE Publication.

¹⁹ Rijali, A, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), . (2019): 81.

kebutuhan maupun kepribadiannya masing-masing. Dalam menangani kasus kekerasan gender berbasis online, maka upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan pemahaman dan kesadaran untuk lebih menekankan paradigma kesetaraan gender serta kegunaan dari digital teknologi yang memang saat ini dikuasai oleh generasi milenial. Kebijakan yang direkomendasikan adalah memasukkan perencanaan pembelajaran dimulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini dikarenakan, selulus dari sekolah dasar para peserta didik belum mendapatkan pengaruh dari dunia luar, sehingga sangat penting untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan kesetaraan gender dan penggunaan digital teknologi yang baik.

Pembelajaran dilakukan setiap seminggu sekali pada saat mata pelajaran Bimbingan Konseling. Di sekolah ada jam BK yang bisa dimanfaatkan dalam memasukkan mengenai pembelajaran ini. Lebih dari itu, guru BK bisa memberikan proyek kampanye sosial Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) kepada peserta didik agar para murid bisa terlibat langsung untuk kegiatan praktiknya. Selain itu bisa mengadakan observasi bersama terhadap sebuah institusi yang berkaitan langsung dalam menangani kekerasan gender. Hal ini penting agar ketika mereka menjadi korban, para peserta didik sudah memahami kepada siapa mereka melaporkan kasus tersebut. Melibatkan siswa secara langsung dalam berbagai kegiatan akan memberikan dampak yang lebih positif dari pada sekedar memberikan materi pelajaran saja.

Peran guru BK dalam pembelajaran anti Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) ini terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, guru sebagai perancang pembelajaran. Dalam melaksanakan peran pertama, maka guru sudah harus siap dengan segala materi dan media pembelajaran yang digunakan. Persiapan ini akan berpengaruh pada tujuan yang akan dicapai, mengingat kasus kekerasan berbasis online merupakan hal yang masih baru maka dibutuhkan pembiasaan agar murid semakin mengerti dan paham terkait hal tersebut. Setelah menjadi perancang maka guru akan berperan sebagai pelaksana. Rancangan yang telah dibuat dilaksanakan dengan matang mulai dari menjelaskan materi, memberikan tugas, mendampingi peserta didik dalam setiap kegiatan dan lain sebagainya. Keberhasilan akan sangat ditentukan oleh beberapa hal tidak hanya dari pihak saja, faktor eksternal akan turut memberikan pengaruh. Peran terakhir adalah penilai, evaluasi dalam setiap pembelajaran akan selalu dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik berhasil dalam memahami dan mengimplementasikan pelajaran yang diterima. Sehingga, ke depannya pembelajaran yang dilakukan dapat menjadi lebih baik lagi.

Pembelajaran akan kurang menarik tanpa ada media yang digunakan. Media pembelajaran menggunakan buku saku yang telah didesign sesuai dengan materi yang berhubungan dengan kesetaraan gender dan pemanfaatan digital teknologi. Di dalamnya juga dijelaskan sanksi-sanksi apa saja yang didapatkan pelaku kekerasan gender sesuai dengan UU yang berkaitan, dampak yang dialami oleh korban kekerasan dan lain sebagainya. Penting sekali dalam memberikan bekal yang seimbang antara materi dengan kegiatan praktik secara langsung khususnya dalam menangani masalah kekerasan gender berbasis online.

Buku saku ini didesign secara sederhana dengan tujuan agar peserta didik tertarik dalam mempelajari substansi di dalamnya. Adanya buku saku ini juga merupakan bagian yang menentukan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Buku saku ini membuat siswa tidak selalu bergantung dengan keberadaan guru. Hal ini juga mendukung implementasi kurikulum 2013 di mana keaktifan peserta didik yang diutamakan, tanpa gurupun mereka bisa belajar secara mandiri. Adapun desain dari buku saku yang diusulkan adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Design buku saku tampak dari depan (dibuat oleh penulis) Peran Siswa

Untuk mencegah dan menyikapi tindak Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) siswa memiliki peran utama untuk bisa mengenali tindakan-tindakan yang termasuk dalam Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Perlu adanya pembentukan konselor sebaya di setiap sekolah yang merupakan perwakilan dari anggota kelas. Pembentukan konselor sebaya ini dilakukan oleh guru bimbingan konseling selaku pembimbing/pembina sehingga ada kolaborasi diantara keduanya. Dengan adanya konselor sebaya ini diharapkan dapat memiliki pemahaman lebih mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dibandingkan dengan siswa yang lain. Konselor sebaya juga menjadi pelopor anti Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang berperan dalam melakukan berbagai aktivitas seperti kampanye anti Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO), diskusi-diskusi antar siswa mengenai (KGBO), dan menjadi teman curhat siswa yang mengalami tindakan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) jika mereka malu menceritakan apa yang telah dialami kepada guru bimbingan konseling.

Namun disamping itu agar terhindar dan dapat menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) siswa juga memiliki peran untuk melindungi data-data pribadi mereka terutama data yang terdapat dalam media. Perlindungan terhadap privasi di dunia maya adalah kunci utama keamanan diri dari berbagai kekerasan atau kejahatan di dunia maya. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan privasi adalah batasan atas diri atau informasi mengenai diri dari jangkauan mata. Dalam ranah

online, melindungi privasi berarti melindungi data pribadi, dari siapa pun yang bisa mengakses informasi tersebut, baik secara online maupun offline. Segera dokumentasikan dan laporkan apabila mengalami Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).

Peran Orang Tua

Peran orang tua juga cukup besar untuk mencegah dan menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) ini. Orang tua sebagai pendidikan informal berguna dalam membentuk karakter baik di lingkungan keluarga. Hal ini dikarenakan orang tua berperan dalam memberikan nilai-nilai dasar pada anak sejak mereka kecil. Saat ini memberikan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar anak seperti laptop dan handphone memang sangat penting, namun tak kalah pentingnya orang tua juga harus melakukan pengawasan terhadap anak terutama dalam menggunakan teknologi untuk berkomunikasi agar tidak menjadi korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).

Memberikan pemahaman dan contoh kepada anak mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi serta media oknum agar tidak menimbulkan dampak oknum pada kemudian hari. Jika orang tua melihat perubahan sikap anak secara oknum dan melihat ciri-ciri adanya tindakan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) terhadapnya segera pantau situasi dan hubungi bantuan terpercaya seperti lembaga, organisasi, institusi terpercaya yang dapat memberikan bantuan terdekat dari lokasi tinggal, seperti bantuan pendampingan oknum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pendampingan psikologis seperti layanan konseling, dan bantuan terkait keamanan digital. Berikut desain buku saku dil

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Beberapa kesimpulan yang bisa dihasilkan dari tulisan ini di antaranya adalah, pertama Harus ada kerja sama yang baik antara Dinas Pendidikan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), guru, murid dan orang tua mengingat permasalahan Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Kedua, Dinas Pendidikan berperan sebagai pengawas pelaksana pembelajaran anti- Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) di masing-masing kota sedangkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) memiliki peran sebagai tempat dalam menangani dan merehabilitasi korban Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO).

Selanjutnya, peran guru Bimbingan Konseling dalam memberikan pembelajaran anti Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) mulai dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat penting, tidak hanya dari segi materi namun juga melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang mendukung. Penggunaan media pembelajaran yang telah didesain dan disiapkan bisa mempermudah siswa memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Di samping itu, para siswa selain menerima materi, mereka juga berperan sebagai konselor sebaya bagi teman-temannya yang mana bisa bermanfaat dalam mencegah kasus Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) di sekolah. Terakhir, Orang tua sebagai tempat pendidikan informal menjadi pendukung dan pengawas anak di lingkungan rumah agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik.

Rekomendasi Kebijakan

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka rekomendasi kebijakan yang diusulkan penulis adalah pembelajaran anti Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) yang dielaborasi dalam

pembelajaran yang diintegrasikan ke mata pelajaran Bimbingan Konseling. Penulis memandang bahwa melalui kebijakan pendidikan maka bisa mengurangi kasus Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) karena pelaku yang melakukan Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait sanksi apa saja yang diterima jika dia melakukan Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) serta bagaimana dampak yang dialami oleh korban. Seperti ungkapan dari Mahatma Gandhi bahwa pendidikan adalah senjata yang ampuh untuk mengubah dunia. Pun melalui kebijakan pendidikan inilah kasus-kasus Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) diharapkan bisa berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ananda, R. 2019. *Perencanaan Pembelajaran* (M. P. Amiruddin (ed.)).

Handoyo, E. 2012. Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 9.

Nasution, W. N. 2017. Perencanaan Pembelajaran: Pengertian, Tujuan dan Prosedur. *Ittihad*, 1(2), 185–195.

Jurnal

Dull, E., & Reinhardt, S. P. 2014. An analytic approach for discovery. In *SAGE Publication* (Second Edi, Vol. 1304). SAGE Publication.

Hanafy, M. S. 2014. Konsep Belajar Dan Pembelajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 17(1), 66–79. <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n1a5>

Illene et al., “Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online.” Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra

Rahmat, P. S. 2019. Ragam Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, vol 5 No 9. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jaxbf>

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

Rijali, A. 2019. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Yanti, S. 2020. Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Website

SAFEnet. 2020. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. 2, 20. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

— “Memahami dan Mengatasi Kekerasan Gender di Sekolah dari Perspektif Bimbingan dan Konseling”, diakses pada 31 Maret, 2021, <http://bk.fip.uny.ac.id/berita/memahami-dan-mengatasi-kekerasan-gender-di-sekolah-dari-perspektif-bimbingan-dan-konseling>

– “Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya dan Apa yang Bisa Dilakukan”, diakses 31 Maret, 2021, <https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230>

Skripsi

Putri, Tiara Aulia.2020. Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Di Kalangan Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. (Skripsi., Universitas Pendidikan Indonesia